

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari zaman orde baru yang mana pembangunan dilaksanakan secara sentralistik yang berarti pembangunan dari atas kebawah. Saat era reformasi paradigma tersebut berubah menjadi pembangunan yang berazaskan desentralisasi yang berarti pembangunan dilakukan dari bawah ke atas (bottom-Up). Hal ini disahkan melalui undang-undang otonomi daerah yang direvisi sebanyak 2 kali yaitu undang-undang no 22 tahun 1999 menjadi undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Azas desentralisasi merupakan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*welfare society*).

Dengan ini diharapkan pemerintah daerah dapat menangkap permasalahan pembangunan yang begitu kompleks di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dapat menyerap aspirasi masyarakat dari bawah untuk perencanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah serta yang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Berbeda dengan yang dilaksanakan selama masa pembangunan yang sentralistik. Instansi-instansi sektoral di daerah hanya menjadi perpanjangan instansi-instansi ditingkat pusat sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang sesuai atau tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut. Tentu saja pembangunan seperti ini akan menjadi tidak efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan dilakukan dari masyarakat paling bawah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya suatu pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan hingga tingkat nasional. Perencanaan pembangunan penting dilakukan agar pembangunan menjadi terarah dan terorganisir demi mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat baik sekarang maupun masa yang akan datang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta lingkungan.

Perencanaan pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi disparitas dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial. Perubahan tersebut di dalamnya juga termasuk percepatan atau akselerasi ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todara, 1987). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga pemerintah daerah dapat mandiri. Pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Setiap daerah memiliki potensi serta struktur ekonomi yang berbeda-beda. Pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ekonomi harus mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang ada. Potensi daerah merupakan daya saing daerah dengan daerah lain yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan perencanaan pembangunan ekonomi agar dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonominya.

Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah tertinggal oleh kementerian pembangunan daerah tertinggal namun pada tahun 2014 daerah Padang Pariaman telah berhasil keluar dari status daerah tertinggal. Hal ini diungkapkan oleh kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Padang Pariaman dalam Sumbaronline.com, Hendra Aswara Yakni “*Alhamdulillah, daerah kita sudah tidak lagi berstatus tertinggal. Ada sekitar 70 kabupaten di Indonesia yang menerima SK serupa*”. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah otonom di daerah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki posisi strategis di wilayah Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman berbatasan langsung dengan Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini memiliki luas 1.328,79 km² berada di pesisir barat pulau Sumatera dan membentang hingga wilayah pegunungan bukit barisan. Hal ini membuat Padang Pariaman memiliki keuntungan tersendiri dari sisi geografis karena memiliki pantai dengan garis pantai 60,5 km dan daerah dataran hingga pegunungan dalam pembangunan wilayah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Sebagai daerah otonom yang diatur dalam undang-undang, Kabupaten Padang Pariaman mempunyai hak untuk mengurus daerahnya agar dapat tumbuh secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Kabupaten Padang Pariaman diberikan kewenangan lebih luas terhadap perencanaan pembangunan di daerah administratifnya termasuk dalam pembangunan ekonominya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Struktur fiskal kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 masih bergantung kepada non pendapatan asli daerah yang mana pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 5.53% dari total pendapatan daerah Padang Pariaman. Ini memberikan arti Kabupaten Padang Pariaman belum bisa mengoptimalkan pendapatannya dari pendapatan asli daerahnya. Sedangkan otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk membangun negerinya secara mandiri agar dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat dilaksanakan dengan membangun struktur ekonomi yang bagus.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2009 sampai dengan 2014 memperlihatkan trend perkembangan yang naik setiap tahunnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi 3,94%, pada tahun 2010 sebesar 5,14%, tahun 2011 kenaikan sebesar 5,58% sedangkan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,09%, tahun 2013 yaitu 6,67% dan tahun 2014 yakni sebesar 6,74% (BPS, 2015). Meskipun pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman mengalami kenaikan setiap tahunnya namun hal ini tidak diikuti dengan pengurangan tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Tingkat pengangguran pada tahun 2010 yakni 4,86%, tahun 2011 sebesar 6,43% serta pada tahun 2012 kenaikan mencapai 7,31% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 7,41%. Menurut Tati (dalam BPS Padang Pariaman, 2013) tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan pada tahun 2011 penduduk miskin berjumlah 44,6 ribu jiwa menjadi 40,2 ribu jiwa pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 36,8 ribu jiwa.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Struktur perekonomian daerah harus diperkuat dengan melihat sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu sektor ekonomi yang dapat diandalkan menjadi sumber penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah serta dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat.

Selama kurun waktu 2008 sampai 2014, rata-rata kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Padang Pariaman didominasi oleh lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi serta lapangan usaha pertanian. Pada sektor

angkutan dan komunikasi peranan terbesar disumbangkan dari subsektor angkutan udara dan sektor pertanian sebagian besar kontribusinya berasal dari subsektor pertanian tanaman pangan. Kontribusi terbesar urutan ketiga ialah sektor jasa-jasa. Selanjutnya peranan industri pengolahan berada diurutan ke empat terhadap PDRB. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2014.

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, maka pembangunan sektor industri pengolahan merupakan pilihan yang potensial untuk menggenjot perekonomian daerah Kabupaten Padang Pariaman. Namun kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif kecil dan cenderung menurun. Pada tahun 2008 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 12.09 %, tahun 2009 kontribusi menjadi sebesar 11,87%, kemudian kontribusi ini turun menjadi 11,83% pada tahun 2010. Tahun 2011 sumbangan sektor industri pengolahan meningkat menjadi 11,91%. Sumbangan sektor ini mengalami penurunan tiga tahun berikutnya yakni pada tahun 2012 sumbangan industri pengolahan yakni 11,80%, tahun 2013 sebesar 11,68% dan tahun 2014 menjadi 11,49% (BPS, 2015).

Dari lampiran dua tentang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, dapat diamati laju pertumbuhan industri pengolahan Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,81%. Tahun 2009 pertumbuhan sektor ini sebesar 2,07% kemudian pada tahun 2010 menjadi 4,81%. Berikutnya tahun 2011 pertumbuhan sektor industri sebesar 6,3% melebihi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman. Tahun 2012 pertumbuhan turun yakni 5,13%, tahun 2013 pertumbuhan sebesar 5,50% dan tahun 2014 pertumbuhan turun menjadi 5,06%.

Sektor industri dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi permasalahan tersebut karena sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain (*leading sector*). Produk-produk industri selalu memiliki dasar tukar yang tinggi serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar daripada sektor-sektor yang lain. Sektor industri juga berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui lapangan kerja, pendapatan masyarakat serta transformasi kultural bangsa kearah modernisasi yang menunjang pembentukan daya saing.

Sektor industri pengolahan dipercaya mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*). Sektor industri pengolahan yang kokoh akan mampu mendorong peningkatan ekspor, penguatan devisa dalam negeri, penciptaan lapangan kerja baru, dan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Sektor industri pengolahan juga secara perlahan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari agraris ke industri (Hartanto, 2004). Kegiatan yang perlu diperhatikan oleh perencana dalam pembangunan ekonomi seperti sektor industri pengolahan adalah kemampuan dalam mengidentifikasi sektor industri yang potensial untuk dikembangkan. Dengan dikembangkannya industri yang potensial diharapkan dapat memberikan efek berganda.

Berdasarkan uraian diatas, sektor industri pengolahan di Kabupaten Padang Pariaman belum dikembangkan secara maksimal. Ini dapat diamati dari pertumbuhan dan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB yang relatif kecil. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul penelitian yaitu “**Identifikasi Subsektor Unggulan Industri Pengolahan Serta Strategi Pengembangannya Di Kabupaten Padang Pariaman**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan subsektor industri pengolahan Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa subsektor unggulan industri pengolahan di Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana strategi pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan subsektor industri pengolahan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengidentifikasi subsektor unggulan industri pengolahan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk menyusun strategi pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertama aspek teoritis, kedua aspek metodologis dan ketiga dilihat dari aspek kebijakan.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsep dasar bagi para peneliti lainnya yang berminat untuk mengidentifikasi sektor unggulan industri pengolahan serta strategi pengembangannya di daerah yang berbeda.
2. Secara metodologis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan metodologi identifikasi sektor unggulan industri pengolahan serta strategi pengembangannya di suatu daerah.
3. Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi bagi pemerintah kabupaten Padang Pariaman sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan serta sebagai pedoman dalam merevisi kebijakan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang identifikasi sektor unggulan industri pengolahan dan strategi pengembangannya di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam identifikasi ruang lingkup penelitian ini akan mengkaji keterkaitan antar sektor industri pengolahan di kabupaten Padang Pariaman dengan wilayah yang lebih luas (Provinsi Sumatera Barat) untuk menentukan industri unggulan dan non unggulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar gambaran yang lebih jelas mengenai isi tesis serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembatasan masalah maka tesis harus disusun secara sistematis. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

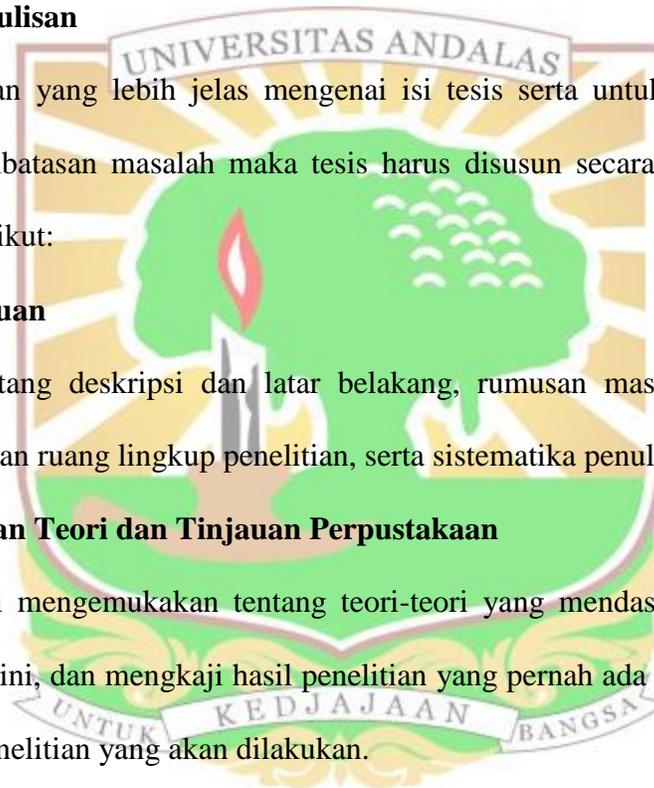
Berisi tentang deskripsi dan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. Pendekatan Teori dan Tinjauan Perpustakaan

Bagian ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendasari dan relevan dengan penelitian ini, dan mengkaji hasil penelitian yang pernah ada yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III. Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang uraian kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini. Bagian ini juga berisi tentang data, sumber data dan metode perhitungan serta model pengujian yang akan dilakukan terhadap data-data yang diperoleh.



BAB IV. Deskripsi Daerah Penelitian

Bab ini berisi tentang deskripsi daerah Kabupaten Padang Pariaman seperti geografi dan kependudukan, ekonomi, pemerintah dan lain-lain.

BAB V. Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang temuan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan penelitian.

BAB VI. kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil sebagai jawaban atas rumusan masalah.

